

Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu
*Analysis of Regional Financial Independence Belu Regency***Kamilaus Konstase Oki¹****Frederic W. Nalle²****Pricilia A.V. Meomanu³**okitance@gmail.com¹fredericnalle@gmail.com²pricilameo@gmail.com³*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Timor¹²³***Abstract**

Belu Regency located in the border region of Indonesia and Timor Leste has economic and political strategic value. Since 2001 the central government has been granted the right to autonomy in managing regional development. Regional finance is the main factor for the government in financing regional needs. The financial resources of the Belu district as regulated in the law are the original regional revenue, the balance fund, profit sharing and other legal income. The financial capacity of the Belu district as measured by fiscal capacity is very small on average 7.81 percent. The level of dependency on the central government is very high, on average, 84.29 percent. This was confirmed by the financial independence of the Belu district which was very low, averaging 8.08 percent and included in the instructive category, meaning that the role of the central government was more dominant than the independence of the regional government.

Keywords: *Decentralization, Dependence, Independence.*

Abstrak

Kabupaten Belu berada di wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste memiliki nilai strategis ekonomi dan politis. Semenjak tahun 2001 oleh pemerintah pusat diberikan hak otonomi dalam mengelola pembangunan daerah. Keuangan daerah menjadi faktor utama pemerintah dalam membiayai kebutuhan daerah. Sumber keuangan daerah kabupaten Belu sebagaimana diatur dalam undang-undang adalah pendapatan asli daerah, dana perimbangan, bagi hasil dan lain-lain pendapatan yang sah. Kemampuan keuangan daerah kabupaten Belu yang diukur dari kapasitas fiskal sangat kecil rata-rata 7,81persen. Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat sangat tinggi rata-rata 84,29 persen. Hal tersebut terkonfirmasi melalui kemandirian keuangan daerah kabupaten Belu yang sangat rendah rata-rata 8,08 persen dan masuk kategori instruktif, artinya peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.

Kata Kunci : Desentralisasi, Ketergantungan, Kemandirian.

Pendahuluan

Kemandirian keuangan daerah adalah suatu kondisi dimana dalam proses penyelenggaraan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah suatu daerah dilakukan secara mandiri yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Kemandirian keuangan suatu daerah guna memenuhi seluruh kebutuhan belanja modal. Semakin besar kebutuhan yang dapat dipenuhi maka semakin tinggi tingkat kemandirian daerahnya (Suhandak dan Triaklasono, 2007). Sebaliknya semakin kecil belanja yang dipenuhi dengan pendapatan asli daerah, maka semakin rendah tingkat kemandirian suatu daerah. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, bahwa setiap daerah berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya untuk mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat dan menciptakan kemandirian daerah.

Dengan pemberian otonomi, daerah dituntut mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dari pemerintah pusat. Adapun sumber-sumber penerimaan daerah atau sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah yaitu Pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain

penerimaan yang sah sebagai penjabaran dalam undang-undang No.33 tahun 2004 tentang keuangan daerah.

Kabupaten Belu merupakan salah satu kabupaten di wilayah perbatasan Timor Leste yang semenjak tahun 2001 bersama daerah lain diberikan hak otonomi. Sebagai daerah perbatasan, isolasi fisik akan ketersediaan tingkat infrastruktur masih terbatas dan isolasi sosial akan kerawanan sosial ekonomi masyarakat masih tinggi. Namun demikian otonomi yang diberikan tanpa melihat kesiapan kabupaten Belu sebagai daerah otonom yang mandiri dalam membiayai pelaksanaan pembangunan. Sebagaimana dalam penelitian Oki (2019) disebutkan bahwa dampak otonomi daerah yang diberikan pemerintah pusat terkesan terlalu cepat tanpa adanya suatu kesiapan matang terlebih dahulu baik dari pemerintah pusat sebagai pemberi hak otonomi maupun pemerintah daerah sebagai pelaksana. Kewenangan penuh yang diberikan pemerintah pusat dalam rangka mengurus rumah tangga sendiri dalam administrasi, pelayanan publik, program-program pembangunan dan keuangan daerah.

Kondisi total pendapatan asli daerah kabupaten Belu semenjak hak otonom diberikan masih sangat kecil kontribusi. Dominasi keuangan daerah bersumber dari dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan kata lain, ketergantungan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerah masih sangat tinggi. Sekalipun demikian, namun upaya nyata pemerintah kabupaten Belu memanfaatkan potensi sumber daya lokal terus mengalami inovasi.

Pelaksanaan pembangunan ditentukan oleh kemampuan kerja kabupaten Belu. Kemampuan kerja ini ditentukan oleh bagaimana upaya pemerintah daerah kabupaten belu dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi dan kekayaan alam lain yang ada sehingga bisa mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam pembangunan daerah.

Kemampuan kerja daerah diukur dengan menggunakan tiga rasio yaitu: rasio desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan, dan rasio kemandirian. Rasio desentralisasi fiskal yang artinya: kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dalam membiayai pembangunan daerah. Rasio ketergantungan yaitu ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktivitas pemerintahan daerah dengan melihat pada tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau provinsi, sedangkan rasio kemandirian menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Masalah dalam penelitian ini untuk mengetahui besarnya tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten Belu. Tujuan yang ingin dicapai adalah mengetahui seberapa besar kemandirian keuangan daerah dalam membiayai pembangunan di kabupaten Belu. Manfaat yang diharapkan adalah memberikan sumbangsi pemikiran terhadap daerah dalam mengambil langkah konkrit dalam memanfaatkan potensi sumber daya secara maksimal.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Belu dengan menggunakan dengan jenis data deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah melakukan analisis rasio desentralisasi fiskal, analisis rasio ketergantungan keuangan daerah, dan analisis rasio kemandirian keuangan daerah. rasio/tingkat kemandirian keuangan suatu daerah adalah:

1. Rasio Desentralisasi Fiskal.

Derajat desentralisasi fiskal dihitung berdasarkan pada perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah (Mahmudi, 2010). Rumus yang digunakan untuk mengukur derajat desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut:

$$DDF = \frac{PAD}{TPD} \times 100\%$$

Keterangan :

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD = Pendapatan Asli Daerah tahun

TPD = Total Pendapatan Daerah

Ukuran besaran desentralisasi fiskal akan terkategori berdasarkan besaran yang akan nampak pada tabel berikut:

Tabel 3

Kriteria Penerimaan Derajat Desentralisasi Fiskal

Persentase PAD Terhadap TPD (%)	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0.00-10.00	Sangat kurang
10.01-20.00	Kurang
20.01-30.00	Sedang
30.01-40.00	Cukup
40.01-50.00	Baik
>50.00	Sangat baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri Dalam Oki, 2019

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah daerah. Rumus yang digunakan untuk mengukur rasio ketergantungan keuangan daerah adalah sebagai berikut (Mahmudi, 2010):

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{TPD}} \times 100\%$$

Keterangan :

TPD = Total Pendapatan Transfer

Kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan daerah dapat dikategorikan seperti Tabel 4 berikut:

Tabel 4

Kriteria Penilaian Rasio Ketergantungan Daerah

Persentase Rasio Ketergantungan (%)	Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah
0.00-10.00	Sangat rendah
10.01-20.00	Rendah
20.01-30.00	Sedang
30.01-40.00	Cukup
40.01-50.00	Tinggi
>50.00	Sangat tinggi

Sumber: Tim Litbang Depdagri Dalam Oki, 2019

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan asli daerah dengan jumlah transfer pemerintah pusat tambah propinsi tambah pinjaman. Rumus yang digunakan untuk mengukur rasio kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut (Mahmudi, 2010):

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{PAD}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Keterangan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah.

Kriteria untuk menetapkan kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan seperti Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5
Pola Hubungan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan Daerah	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0-25	Instruktur
Rendah	25-50	Konsultif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Sumber: Tim Litbang Depdagri Dalam Oki, 2019

Keterangan:

1. Instruktur : Peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah.
2. Konsultatif : Campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap lebih mampu melaksanakan otonomi.
3. Partisipatif : Peran pemerintah pusat mulai berkurang karena tingkat kemandirian mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
4. Delegatif : Campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah

Pembahasan

Rasio desentralisasi fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan, besarnya rasio desentralisasi fiskal Kabupaten Belu nampak pada tabel berikut:

Tabel 6
Rasio Desentralisasi Keuangan Daerah Kabupaten Belu

Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal	Keterangan
2008	22.258.927.170,00	488.751.838.170,00	4,55	Sangat kurang
2009	22.095.998.629,20	481.726.082.971,00	4,59	Sangat kurang
2010	33.447.006.092,00	558.406.477.167,00	5,99	Sangat kurang
2011	34.802.681.366,00	662.447.956.906,00	5,25	Sangat kurang
2012	47.085.513.257,18	744.566.894.925,16	6,32	Sangat kurang
2013	63.821.358.066,00	782.485.223.521,00	8,16	Sangat kurang
2014	70.227.478.518,70	586.677.127.234,70	11,97	Kurang
2015	72.408.429.831,90	738.626.408.497,90	9,80	Sangat kurang
2016	74.823.080.564,95	816.442.053.569,95	9,16	Sangat kurang
2017	101.246.072.215,34	959.717.412.277,44	10,55	Kurang
2018	88.592.824.574,83	926.095.278.690,83	9,57	Sangat kurang
Rata-rata	57.346.306.389,65	704.176.613.993,73	7,81	Sangat kurang

Sumber : BPKAD Kabupaten Belu. Diolah, 2020

Jika dilihat dari jumlah rata-rata rasio desentralisasi fiskal yaitu 7.81 persen. Ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah kabupaten Belu belum mampu menjalankan kewenangan dan tanggung jawab dalam desentralisasi fiskal yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

Rasio Ketergantungan adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktiivitas pembangunan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah (Mahmudi, 2010). Hasil analisis yang dilakukan diperoleh data ketergantungan keuangan daerah kabupaten terlihat pada tabel berikut:

Tabel 7
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Belu

Tahun	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan Daerah	Rasio Ketergantungan	Keterangan
2008	455.519.642.217,00	488.751.838.170,00	93,20	Sangat Tinggi
2009	475.602.087.209,00	481.726.082.971,00	98,73	Sangat Tinggi
2010	471.084.561.811,00	558.406.477.167,00	84,36	Sangat Tinggi
2011	511.229.980.728,00	662.447.956.906,00	77,17	Sangat Tinggi
2012	644.186.875.011,00	744.566.894.925,16	86,52	Sangat Tinggi
2013	705.405.517.314,00	782.485.223.521,00	90,15	Sangat Tinggi
2014	452.094.507.017,00	586.677.127.234,70	77,06	Sangat Tinggi
2015	578.467.976.007,00	738.626.408.497,90	78,32	Sangat Tinggi
2016	676.380.888.419,00	816.442.053.569,95	82,84	Sangat Tinggi
2017	779.291.768.009,00	959.717.412.277,44	81,20	Sangat Tinggi
2018	719.295.914.950,00	926.095.278.690,83	77,67	Sangat Tinggi
Rata-rata	588.050.883.517,46	704.176.613.993,73	84,29	Sangat Tinggi

Sumber : BPKAD Kabupaten Belu. Olahan, 2020

Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio ketergantungan kabupaten Belu selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, rata-rata adalah sebesar 84.29 persen. Hali ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah kabupaten Belu terhadap daerah lain melalui pemerintah pusat melalui dana perimbangan masih sangat tinggi.

Menurut Mardiasmo (2002) mengatakan bahwa kemandirian keuangan suatu daerah dapat diukur dengan menggunakan rasio kemandirian. Rasio kemandirian menggambarkan derajat kemandirian suatu daerah atau mengukur seberapa besar penerimaan yang berasal dari daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah. Hasil penelitian dan perhitungan kemandirian keuangan daerah kabupaten Belu nampak terlihat pada tabel berikut:

Tabel 8
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu

Tahun	PAD	Transfer Pusat + Transfer Provinsi	Rasio Kemandirian	Keterangan	Pola Hubungan
2008	22.258.927.170,00	913.466.979.484,00	2,44	Rendah Skali	Instruktif
2009	22.095.998.629,20	957.328.170.180,00	2,31	Rendah Skali	Instruktif
2010	33.447.006.092,00	992.192.080.722,00	3,37	Rendah Skali	Instruktif
2011	34.802.681.366,00	113.618.205.658,80	3,06	Rendah Skali	Instruktif
2012	47.085.513.257,18	134.230.230.050,80	3,51	Rendah Skali	Instruktif
2013	63.821.358.066,00	458.112.204.038,00	13,93	Rendah Skali	Instruktif
2014	70.277.478.518,00	500.102.169.017,00	14,04	Rendah Skali	Instruktif
2015	72.408.429.831,90	595.233.487.943,00	12,16	Rendah Skali	Instruktif
2016	74.823.080.564,95	694.074.546.973,00	10,78	Rendah Skali	Instruktif
2017	101.246.072.215,34	835.430.440.209,00	12,12	Rendah Skali	Instruktif
2018	88.592.824.574,83	791.747.087.950,00	11,19	Rendah Skali	Instruktif
Rata-rata	57.346.306.389,65	635.114.965.475,06	8,08	Rendah Skali	Instruktif

Sumber : BPKAD Kabupaten Belu. Olahan, 2020

Data menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Belu setiap tahunnya mencapai persentase dibawah 25 persen. Jika dilihat dari pola hubungan tingkat kemampuan daerah maka kemandirian keuangan daerah kabupaten Belu dikategorikan sangat rendah dan pola hubungannya Instrukturif. Jumlah nilai rata-rata, tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Belu rata-rata sebesar 8.08 persen, dengan demikian kriteria kemandirian keuangan daerah adalah rendah sekali dan pola hubungannya Instrukturif. Artinya peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah, atau bisa dikatakan Pemerintah Kabupaten Belu belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara baik yang diberikan pemerintah pusat.

Simpulan

Rasio Desentralisasi Fiskal kabupaten Belu dikategorikan sangat kurang dalam membiayai pembangunan daerah, hal ini juga nampak tingginya rasio ketergantungan yang sangat pada pemerintah pusat. Demikian juga rasio kemandirian keuangan daerah sangat rendah dan masuk pada pola instruktif, dimana peran pemerintah pusat lebih dominan dibandingkan dengan kemandirian pemerintah daerah. Kabupaten Belu memiliki kelebihan karena berada di wilayah perbatasan yang miliki nilai strategis ekonomi dan politik. Selain nilai strategis, kabupaten Belu memiliki potensi sumber daya alam potensial baik sektor pertanian, peternakan, pertambangan, sumber daya laut, pariwisata dan lainnya. Karena itu diperlukan perhatian khusus dalam memanfaatkan nilai lebih yang dimiliki dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam kerangka mencapai daerah otonomi yang mandiri.

Daftar Pustaka

- Mahmudi. 2010. *Analisis laporan keuangan Daerah*. Yogyakarta STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit: Andi. Yogyakarta.
- Halim, Abdul, 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit UPP AMP YKPN Yogyakarta.
- Oki, Kamilaus Konstanse. 2019. *Dampak Otonomi Daerah Terhadap Kapasitas Fiskal Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 4 No.2 Juni 2019. Issn: 2503-3093.
- Suhandak dan Triaklasono. 2007. *Paradigma Baru, Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyusunan APBD di era Otonomi*. Malang.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah
- Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang keuangan daerah.